



## DALAM EDISI BULAN INI

- 01 Program magang FORCLIME bagi siswa Tanah Papua untuk dukung pembangunan Papua hijau
- 02 FORCLIME fasilitasi pelatihan FPIC di Tanah Papua
- 03 Sinkronisasi rencana kegiatan bersama KPHP Tambrau
- 04 Badan Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar dokumentasikan pembelajaran pengelolaan Hutan Diklat Tabo-tabo
- 05 Lokakarya hasil kajian dan evaluasi Program Bakti Rimbawan

## Editorial

Sejak tahun 2019, *Forests and Climate Change Programme* (FORCLIME) telah mengembangkan kerja sama dengan Universitas Papua (Unipa) di Manokwari dan Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura untuk pengembangan program magang bagi mahasiswa dan *fresh graduate* khususnya fakultas kehutanan. Pengembangan program magang tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan mengenal dunia kerja bagi mahasiswa dan alumni *fresh graduate* dari dua perguruan tinggi tersebut. Pengenalan dunia kerja ini mencakup aspek *hard skill* seperti pengenalan konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH), perhutanan sosial, perpetaan dan berbagai aspek teknis lainnya. Selain itu, peserta magang juga belajar aspek *soft skills* seperti membangun kerja sama tim, disiplin, *problem solving*, *decision making*, pengelolaan waktu, komunikasi, adaptasi.

Untuk mendorong terwujudnya program magang yang efektif, FORCLIME mendesain tahapan program magang sebagai berikut:

1. **Rekrutmen tenaga magang**, yang dilakukan bersama dengan universitas terkait. Rekrutmen ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek prestasi kuliah dan motivasi untuk mengikuti magang.
2. **Pelatihan pembekalan**, untuk mengenalkan keberadaan FORCLIME serta ruang lingkupnya seperti pembangunan KPH, mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, perhutanan sosial, *knowledge management*, aturan administrasi keuangan GIZ.
3. **Penempatan di lapangan**, tenaga magang yang sudah memperoleh pembekalan kemudian ditempatkan di kantor FORCLIME di pusat dan daerah maupun di kantor mitra kerja dengan didampingi oleh mentor dari FORCLIME. Selama di lapangan, tenaga magang menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan di bawah bimbingan para mentor.

4. **Lokakarya Evaluasi**, dilakukan untuk menggali pembelajaran, kesan dan masukan dari para mahasiswa terkait dengan kegiatan magang yang telah mereka lakukan.

Dengan dicanangkannya “program kampus merdeka, merdeka untuk belajar” oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Melalui program ini mahasiswa diperkenankan untuk belajar dan mencari pengalaman di luar kampus dan akan memperoleh bobot kredit penilaian.

Oleh karenanya program magang ini menjadi sebuah terobosan menarik untuk memberikan akses pembelajaran bagi generasi muda. Mereka bisa melihat dinamika dan mekanisme kerja di berbagai instansi, tanpa mereka harus meninggalkan bangku kuliah bahkan pengalaman barunya akan dihargai dengan angka kredit.

Pengembangan program magang untuk generasi muda akan menjadi strategi alternatif untuk penciptaan sumber daya manusia kehutanan yang profesional, berintegritas dan kompeten di masa depan. Hal itu akan menjadi sebuah gerakan efektif bila kantor instansi pemerintah, program kerja sama internasional, lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan swasta mau bergandengan tangan untuk mengembangkan program magang yang didesain secara terstruktur dan sistematis serta disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada.



**Edy Marbyanto**

Manajer bidang strategis pengembangan kapasitas SDM

# Program magang FORCLIME bagi siswa Tanah Papua untuk dukung pembangunan Papua hijau

Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan kapasitas SDM



Sebagai bagian dari pengembangan kesempatan pendidikan dan bekerja bagi generasi muda, GIZ Indonesia menawarkan kesempatan bagi mahasiswa dan *fresh graduate* untuk melakukan magang di GIZ yang temanya disesuaikan dengan kebutuhan program-program yang diimplementasikan GIZ. Dengan spirit tersebut, FORCLIME mengadakan program magang bagi mahasiswa dari universitas di Tanah Papua sebagai sarana belajar praktik menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di kampus, dan belajar mengenal dunia kerja.

Persiapan kegiatan magang di FORCLIME dimulai setelah adanya amandemen perjanjian implementasi (*implementation agreement*), sehingga FORCLIME memiliki mandat untuk memulai kegiatan program di Tanah Papua. Pengembangan program ke wilayah Papua ini dimaksudkan sebagai upaya *scaling up* pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan FORCLIME di wilayah Kalimantan. FORCLIME memulai program magang bekerja sama dengan Universitas Papua (Unipa) di Manokwari dan Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura untuk mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa dan lulusan baru yang diharapkan dapat mendukung pembangunan kehutanan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di masa depan.

Proses magang dengan mahasiswa dari Tanah Papua dimulai pada Maret 2019, ketika staf FORCLIME mengunjungi Unipa dan Uncen untuk merekrut mahasiswa. Total ada 15 mahasiswa yang mengikuti program magang, delapan mahasiswa dari Uncen dan tujuh mahasiswa dari Unipa. Mahasiswa Uncen menjalani magang selama 2,5 bulan (pertengahan Juni – Agustus), sedangkan mahasiswa Unipa magang selama 4,5 bulan (pertengahan Juni – Oktober). Perbedaan durasi magang di kedua universitas tersebut terjadi karena perbedaan profil peserta magang yang mengikuti program tersebut, dimana peserta magang dari Uncen masih berstatus mahasiswa yang sedang menjalani program Praktek Kerja Lapang (PKL), dan peserta magang dari Unipa adalah lulusan baru.

Pada Juni 2019, siswa terpilih diberikan pelatihan intensif selama seminggu tentang program menulis, komunikasi, manajemen pengetahuan dan FORCLIME di Green School Bali. Dalam sesi pembukaan, Penasihat Pengembangan Kedutaan Besar Jerman, Dr. David Tantow, mengatakan, “Program magang adalah untuk pengembangan kapasitas bagi para siswa bagi karir masa depan”.

Ekspresi serupa juga disampaikan oleh perwakilan dari Biro Kerja Sama Internasional KLHK, ibu Anggraeni Oktavia, yang menyarankan kepada peserta magang agar memanfaatkan program magang secara maksimal untuk meningkatkan dan menambah keterampilan dan mendapatkan pengalaman.

“

Ini adalah kesempatan langka karena tidak semua program kerja sama menyediakan program magang seperti yang diselenggarakan oleh FORCLIME”,

kata ibu Anggraeni Oktavia dari Biro Kerja Sama Internasional, KLHK.

Setelah pelatihan, mahasiswa ditempatkan di area demonstrasi FORCLIME, yaitu: Jakarta (dua magang), Bogor (dua magang), Tanjung Selor (dua magang), Pontianak (satu magang), Putussibau (tiga magang), Berau (satu magang), Samarinda (satu magang), dan Palu (tiga magang).

Selain kegiatan nyata di lapangan, peserta magang diberi kesempatan untuk berjejaring di antara para peserta. FORCLIME mendukung pengembangan ini melalui konsep pendampingan dengan menugaskan staf teknis FORCLIME menjadi mentor magang selama mereka berada di FORCLIME.



Yang menarik dari sesi magang ini, di akhir magang peserta didorong untuk menyusun proposal penelitian yang relevan untuk Papua dan FORCLIME menyediakan dana untuk pelaksanaan penelitian yang mereka ajukan. Hal ini sangat disambut baik oleh para peserta magang, utamanya peserta dari Uncen, karena mereka bisa menggunakan dana penelitian ini untuk mendukung penyusunan skripsi yang mereka lakukan. Tentunya pelaksanaan penelitian ini harus mengikuti aturan dan peraturan GIZ dalam hal keuangan dan manajemen proyek.

Hasil penelitian para peserta magang dipresentasikan pada bulan Juli – Agustus 2020, yang pada saat itu pandemi Covid-19 sudah mulai sehingga dilakukan melalui webinar.



Setelah masa magangnya berakhir, para siswa Uncen kembali ke kampus di Papua. Sedangkan para magang Unipa masih bertugas di FORCLIME. Setelah empat setengah bulan melakukan magang di FORCLIME, tujuh lulusan Universitas Papua berbagi pengalaman dalam lokakarya Evaluasi Magang tanggal 28-31 Oktober 2019 di Yogyakarta. Sebagai bagian dari lokakarya, peserta magang belajar tentang pengelolaan hutan di Yogyakarta dengan mengunjungi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta (pabrik minyak kayu putih, hutan tanaman jati), lokasi ekowisata yang terkenal (Mangunan, Kalibiru) dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Dalam lokakarya tersebut peserta magang menjelaskan bahwa mereka memperoleh banyak pengetahuan selama magang.

“

“Saya belajar banyak selama magang, terutama, karena magang saya lebih percaya diri berbicara di depan banyak orang”, kata salah seorang peserta magang, Frids N. Ronsumbre.

Setelah berakhirnya program magang bagi peserta magang dari Unipa, dilakukan evaluasi untuk meninjau apa yang dapat ditingkatkan untuk program magang yang akan datang di masa depan.

**Webinar**  
Dinamiskan oleh Forest and Climate Change Programme (FORCLIME)

**Hasil penelitian dari Tanah Papua**  
Laporan penelitian mahasiswa magang di Program FORCLIME

Sebagai bagian dari pengembangan kesempatan berdidik dan bekerja bagi mahasiswa Papua dan Papua Barat, GIZ Indonesia memberi kesempatan bagi mahasiswa Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua melakukan magang di wilayah kerja FORCLIME pada bulan Juni – Oktober 2019. Setelah magang mereka diberi kesempatan untuk melakukan penelitian di Tanah Papua. Hasil penelitian mereka akan disajikan dalam serangkaian Sari selama akan menyajikan hasil penelitian.

- *Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat di wilayah sub DAS Keerom, Kabupaten Keerom oleh Chery Adityaningih*
- *Analisa vegetasi dan pendugaan cadangan karbon di kawasan hutan lindung Irtar, Kabupaten Sarmi oleh Sammaria J. Karma*

Hasil penelitian tersebut akan disampaikan melalui webinar pada:

**Hari/Tanggal: Kamis, 9 Juli 2020**  
**Jam: 09.00 – 11.00 (WIB)**  
**Tempat: MS Teams**

**Seminarist:**  
Georg Buchholz  
Direktur Program FORCLIME

**Moderator:**  
Mohamad Sidiq  
Koordinator Provinsi Kalimantan Utara, FORCLIME

**Sammaria J. Karma**  
Mahasiswa FMIPA, Universitas Cenderawasih

**Chery Adityaningih**  
Mahasiswa FMIPA, Universitas Cenderawasih

Kontak dan registrasi: Email surel: [tulekarnana@unipa.ac.id](mailto:tulekarnana@unipa.ac.id) dan instansi ke [sakar.yunisa@giz.de](mailto:sakar.yunisa@giz.de)



“

Kami berterimakasih atas kerja sama FORCLIME dan Fakultas Kehutanan. Melalui kerja sama ini, mahasiswa kami diberi kesempatan untuk mengikuti magang, bahkan ada juga yang sudah direkrut sebagai staf FORCLIME”,

kata Dr. Jonni Marwa, Dekan Fakultas Kehutanan Unipa.

Menyusul keberhasilan program magang yang dilaksanakan pada tahun 2019, FORCLIME melanjutkan program tersebut pada tahun 2020. Lima lulusan baru dari Universitas Papua dan satu mahasiswa dari Universitas Ottow Geissler mengikuti program magang. Karena pandemi Covid-19, magang dilakukan sepenuhnya secara online. Masing-masing peserta magang didampingi oleh mentor untuk memfasilitasi dan mengawasi pekerjaan mereka selama magang. Kegiatan magang berlangsung selama dua setengah bulan dan diawali dengan Lokakarya Pengenalan yang diadakan pada tanggal 14-18 September 2020. Kegiatan ini juga dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi MS Teams.

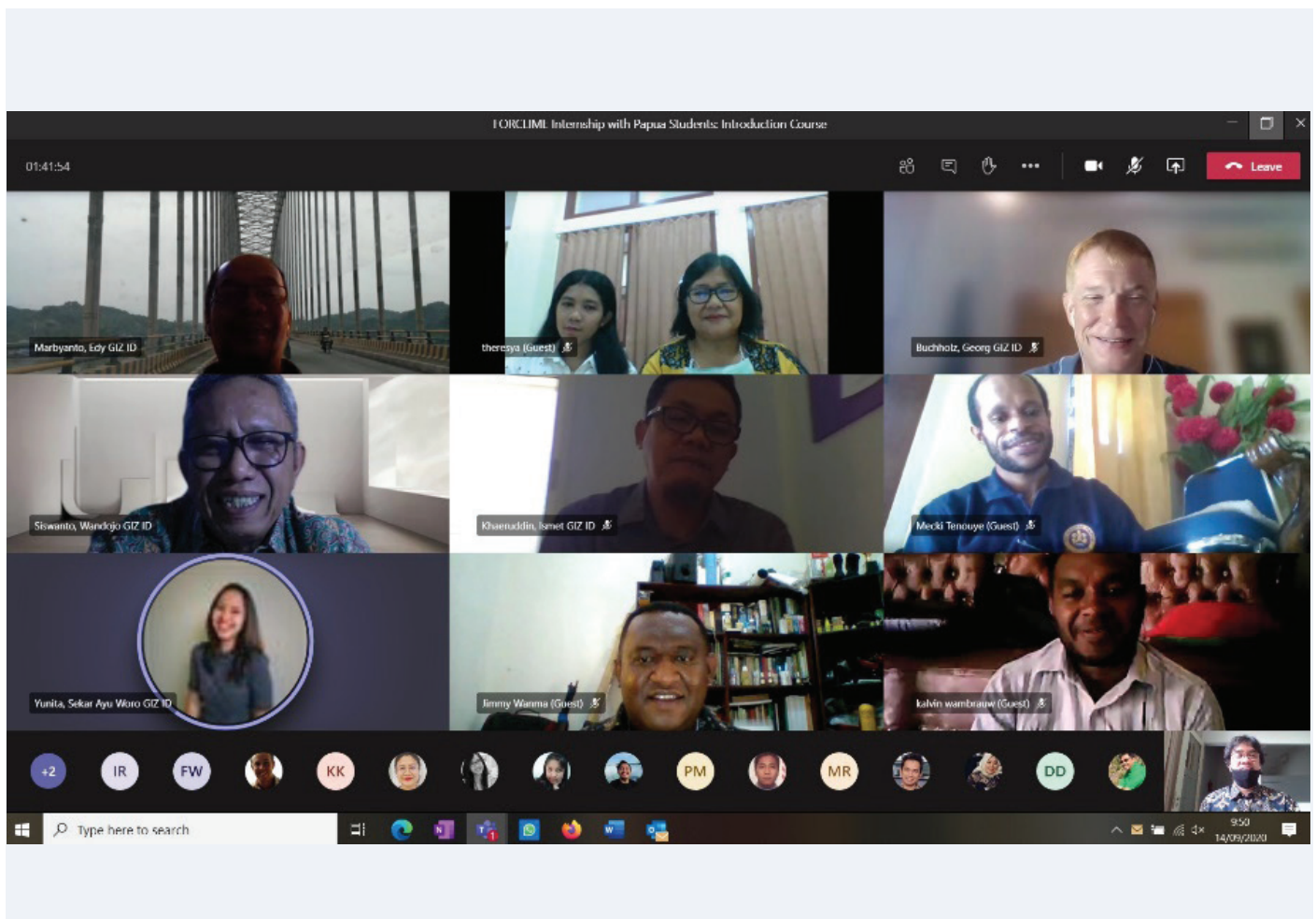
Pada lokakarya tersebut, peserta magang diberi informasi mengenai berbagai topik. Termasuk program prioritas di bidang kehutanan, GIZ, FORCLIME dan bidang tematiknya seperti perhutanan sosial, konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan mitigasi

perubahan iklim di bidang kehutanan. Selain itu, peserta magang juga mendapatkan wawasan dari program GIZ lainnya terkait dengan pencegahan korupsi di sektor kehutanan, pengelolaan lahan gambut, dan rantai pasokan pertanian berkelanjutan.

Saat magang, peserta diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan sesuai dengan minat mereka. Topik pelatihan yang ditawarkan saat itu adalah Statistik dengan R oleh Universitas Indonesia dan Manajemen Proyek untuk pemula oleh PPM manajemen. Dua orang memilih pelatihan dari UI, sedangkan empat lainnya memilih pelatihan dari PPM manajemen.

Pada akhir masa magang, mereka menyampaikan laporan yang disusun secara individual, tentang:

1. Identifikasi awal masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrau.
2. Kondisi pembangunan dan infrastruktur di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrau.
3. Mendukung Penyusunan Modul Diklat E-learning yang Interaktif.
4. Identifikasi kebutuhan Diklat bagi SDM KPHP Sorong Selatan dan Tambrau.
5. Direktori organisasi terkait dengan hutan dan perubahan iklim di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Program magang FORCLIME kemudian berlanjut di tahun 2021 yang melibatkan tiga universitas, yaitu Universitas Cenderawasih, Universitas Papua dan IPB University. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Universitas Cenderawasih: dua orang dari program studi geofisika FMIPA dan dua orang dari antropologi (FISIP).
2. IPB University: dua orang
3. Universitas Papua: empat orang dari Fakultas Kehutanan

Seperti program magang sebelumnya, untuk peserta magang 2021 juga diberikan pelatihan pembekalan yang antara lain mencakup pengenalan GIZ, FORCLIME dan bidang tematiknya seperti perhutanan sosial, konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan. Selain itu juga disampaikan materi tambahan seperti *Knowledge Management*, *Sustainable Development Goals* (SDGs), Pengarusutamaan Gender (PUG) dan sistem administrasi di GIZ. Pelatihan ini diselenggarakan selama 3 hari secara hybrid (kombinasi *online* dan *offline meeting*).

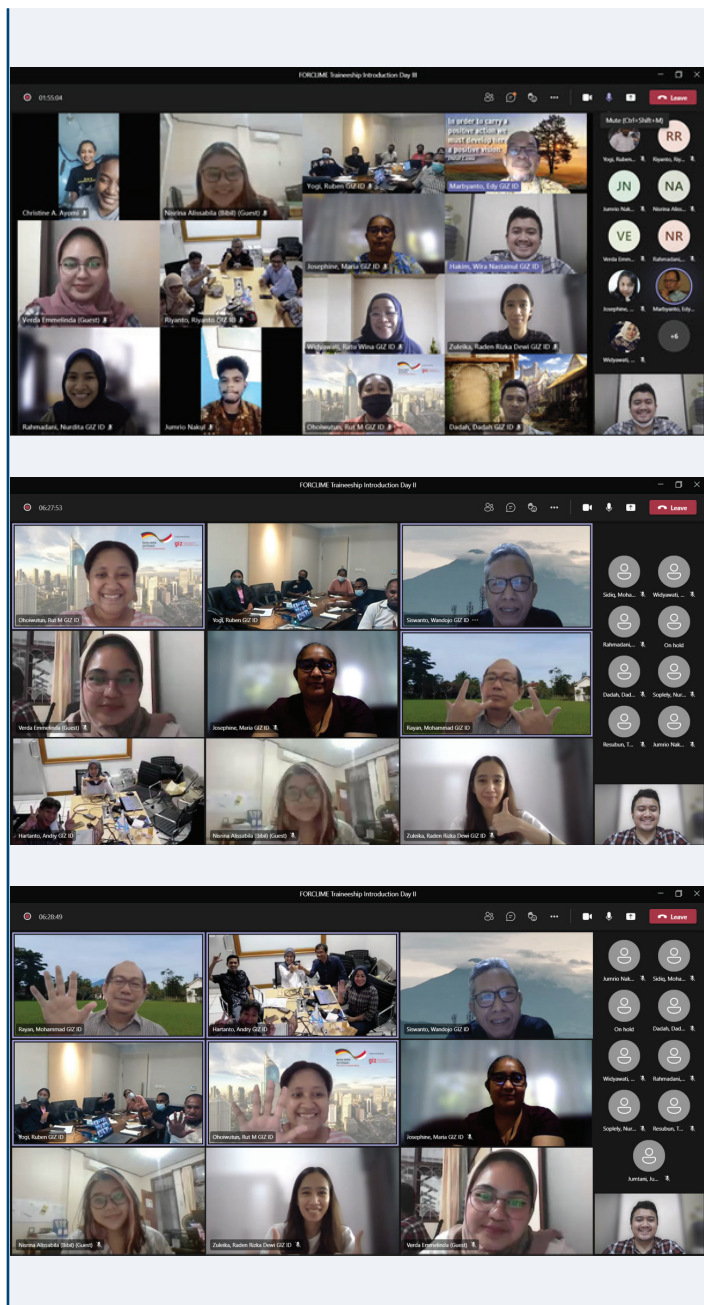
Selanjutnya peserta magang dari Uncen dan Unipa akan membantu tim FORCLIME di Papua dan Papua Barat dalam kegiatan terkait dengan pelaksanaan studi kelayakan program konservasi hutan melalui pelayanan kesehatan untuk masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, sebagai [upaya menyelaraskan kesehatan manusia dan kesehatan hutan di Tanah Papua](#), yang dilaksanakan oleh Yayasan Alam Lestari (ASRI). Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua) dan Kabupaten Tamberau (Provinsi Papua Barat). Hasil dari studi kelayakan ini akan menentukan jenis program yang akan dilaksanakan, yang tentunya berkaitan dengan kesehatan berbasis konservasi dengan mempertimbangkan karakter sosial – budaya masyarakat lokal. Selain itu, mereka juga akan dilibatkan dalam penyusunan profil Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), identifikasi desa dampingan, dan pendampingan dalam pengembangan hutan Diklat di Universitas Ottow Geissler.

Sedangkan peserta magang dari IPB University akan membantu tim bidang strategis pengembangan kapasitas SDM di Pusat Diklat SDM LHK untuk mengubah modul training konvensional menjadi modul training e-learning yang interaktif dan menarik.



Program magang ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan dan juga pengalaman kerja, sudah ada dua mahasiswa jurusan Geofisika yang melakukan magang terkait pemetaan di FORCLIME dan sangat membantu jurusan di kampus”;

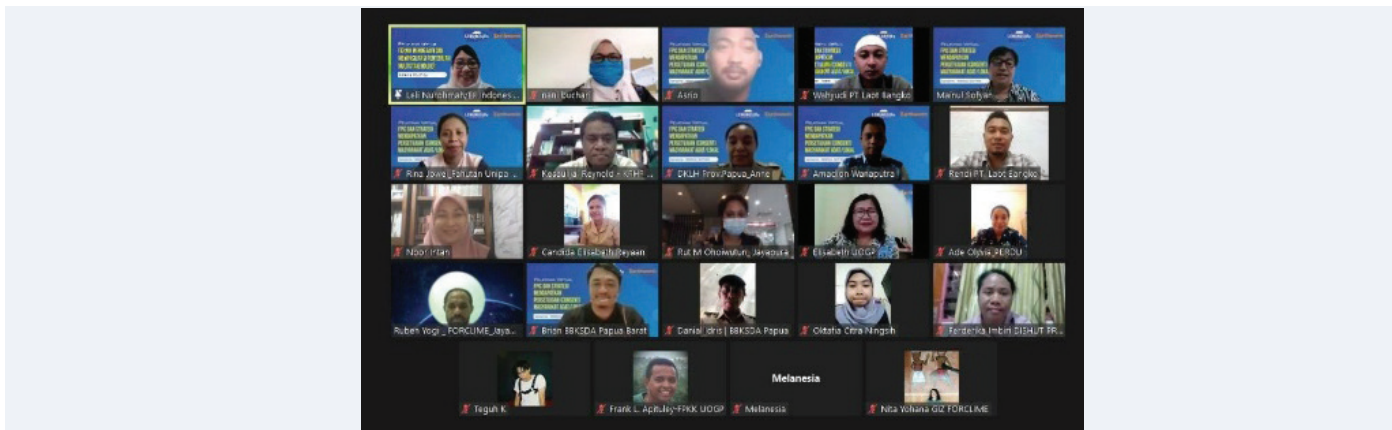
kata Dr. Yusuf Bungking, Kepala Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cenderawasih.



Program magang yang dikembangkan oleh FORCLIME ini merupakan pendekatan yang *win-win solution*. Bagi mahasiswa, program magang ini memberikan ruang untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus belajar mengenal dunia kerja dari sisi *hard skills* maupun *soft skills*. Sedangkan bagi FORCLIME, ide dan kreativitas peserta magang dapat digunakan untuk memperkaya dan mendukung implementasi program. Dan bagi GIZ, program magang ini bisa digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan tenaga-tenaga yang berbakat dan berkualitas yang bisa dilibatkan untuk pelaksanaan program-program GIZ di masa depan.

Spirit pengembangan kapasitas siswa bagi pembangunan kehutanan di Tanah Papua akan terus dipromosikan dalam program kerja FORCLIME melalui program magang bagi mahasiswa dari universitas di Tanah Papua. Dengan harapan pembelajaran yang diperoleh selama program magang akan mereka terapkan menuju terciptanya pembangunan berkelanjutan dan kelestarian hutan di Tanah Papua.

# FORCLIME fasilitasi pelatihan FPIC di Tanah Papua



Sebelum melakukan kegiatan pembangunan di tingkat tapak, diperlukan adanya persetujuan dari masyarakat lokal sebagai pihak yang paling berpotensi terkena dampak pembangunan. Hal ini menjadikan pentingnya pemahaman akan cara mendapatkan persetujuan masyarakat lokal sesuai dengan prosedur, etika, dan proses yang memadai, sehingga konflik yang terjadi dapat diminimalkan. Atas dasar hal tersebut, FORCLIME memfasilitasi perwakilan pemerintah, LSM, serta akademisi di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengikuti pelatihan terkait *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang diselenggarakan oleh Earthworm Foundation dan salah satu unit bisnisnya, Lemungsure.

Pelatihan FPIC dilaksanakan pada tanggal 20 September, 28 September, dan 5 Oktober 2021 secara daring. FORCLIME memfasilitasi 20 peserta untuk mengikuti pelatihan, yang merupakan representasi dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua, Balai BKSDA Papua Barat, Balai Taman Nasional Wasur, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tambrau, KPHP Sorong Selatan, Universitas Papua, Universitas Cenderawasih, Universitas Ottow Geissler Papua, PERDU Manokwari, dan FORCLIME. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan hal-hal fundamental yang perlu diperhatikan sebelum memulai kegiatan pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat, seperti:

1. Definisi, prinsip, dan tahapan FPIC;
2. Menjalankan tahapan FPIC;
3. Mitigasi konflik kepentingan para pihak; dan
4. Strategi dan taktik mendapatkan persetujuan masyarakat.

Selama pelatihan, setiap peserta memberikan studi kasus dengan mengangkat topik nyata berdasarkan bidang kerja di lapangan. Pada akhir pelatihan, dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta akan proses FPIC. Berdasarkan evaluasi tersebut, 62,5% peserta sangat setuju bahwa mereka memiliki peningkatan pengetahuan; 37,5% peserta setuju; dan tidak ada peserta yang tidak memiliki peningkatan pengetahuan.



Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:  
[Melanesia Brigitte Boseran](#), Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaan, pengelolaan dan konservasi hutan  
[Ruben Yogi](#), Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan  
[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

“Hal paling penting yang saya pelajari dalam FPIC ini adalah terkait proses persetujuan oleh masyarakat adat sebelum dilaksanakan pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam”, kata salah satu peserta, Reynold Kesaulija, S.Hut, M.Si., Kepala KPHP Sorong Selatan.

## Sinkronisasi rencana kegiatan bersama KPHP Tambrauw

Untuk membangun sinergi pelaksanaan program kerja tahun 2021, FORCLIME dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tambrauw mengadakan pertemuan pada Selasa, 12 Oktober 2021 di Kantor KPHP Tambrauw, Sausapor, Papua Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala KPHP Tambrauw, Petrus Freddy Tawer, S.Hut. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan mengenai potensi sinkronisasi program kerja antara FORCLIME dan KPHP Tambrauw, diantaranya melalui penyiapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KPHP Tambrauw.

Selain itu, dibahas juga persiapan kunjungan lapangan ke potensi kampung binaan FORCLIME dan KPHP Tambrauw. Terdapat tiga kampung yang dikunjungi, yaitu Kampung Orwem di Distrik Kwoor, Kampung Emaus di Distrik Sausapor, dan Kampung Bikar di Distrik Bikar. Kunjungan lapangan tersebut dilaksanakan keesokan harinya, tanggal 13-15 Oktober 2021, bersama-sama antara perwakilan FORCLIME dan KPHP Tambrauw.

Kepala KPHP Tambrauw mengapresiasi FORCLIME yang telah berkunjung ke Tambrauw untuk melakukan sinkronisasi program kerja dan mengidentifikasi kampung binaan bersama-sama. "Pengelolaan dan pengembangan KPHP membutuhkan



dukungan berbagai pihak, oleh karena itu kami berterima kasih atas kerja sama yang diberikan FORCLIME. Sebagai orang asli Tambrauw, saya berharap potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang melimpah di Tambrauw dapat dikelola secara bersinergi bersama Dinas Kehutanan, KPHP, dan masyarakat", kata Bapak Petrus Freddy Tawer, Kepala KPHP Tambrauw.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Nita Yohana](#), Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

[Melanesia Brigitte Boseran](#), Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaan, pengelolaan dan konservasi hutan

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

## Badan Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar dokumentasikan pembelajaran pengelolaan Hutan Diklat Tabo-tabo



Badan Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BD LHK) Makassar telah diberi mandat untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Tabo-tabo sejak tahun 2010. Pengelolaan Hutan Diklat ini cukup menantang karena BD LHK Makassar dituntut untuk dapat menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, di sisi lain sumber daya yang tersedia (SDM, keuangan, dll) relatif terbatas. Menghadapi situasi ini, BD LHK Makassar telah melakukan beberapa strategi, seperti pengembangan jejaring kerja sama, pengembangan kemitraan bersama masyarakat, pengembangan demplot dan lain-lain. Inisiatif pengembangan strategi pengelolaan hutan Diklat ini penting untuk didokumentasikan karena bisa dijadikan bahan

pembelajaran bagi pengelola KHDTK di tempat lain. Oleh karenanya, FORCLIME mendukung inisiatif BD LHK Makassar untuk mendokumentasikannya dalam sebuah publikasi.

Sebagai langkah awal penyusunan buku pembelajaran Pengelolaan Hutan Diklat Tabo-tabo, pada tanggal 21-25 Oktober 2021, BD LHK Makassar bekerja sama dengan FORCLIME telah mewawancarai para pemangku kepentingan yang merupakan perwakilan dari BD LHK Makassar, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Makassar, SMK Kehutanan Makassar dan Maros, Pokja Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulusaraung, pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa Tabo-tabo serta Kelompok Tani Hutan dampingan BD LHK Makassar.

Hasil wawancara tersebut akan disusun dalam sebuah buku mengenai pembelajaran pengelolaan Hutan Diklat Tabo-tabo. Buku ini diharapkan sudah selesai dan tersedia pada bulan November 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Edy Marbyanto](#), Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

# Lokakarya hasil kajian dan evaluasi Program Bakti Rimbawan



Sejak tahun 2014, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mengembangkan Program Bakti Rimbawan (BR) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sampai tahun 2019, realisasi jumlah tenaga BR yang pernah ditugaskan di KPH sebanyak 2.594 orang. Berdasarkan data terakhir, kini hanya tinggal 1.068 Bakti Rimbawan yang aktif bekerja di lapangan. Meskipun jumlah tenaga yang sampai saat ini masih bertahan tergolong kecil, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BP2SDM menunjukkan bahwa tenaga Bakti Rimbawan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi operasionalisasi KPH di lapangan.

Dengan akan berakhirnya Program Bakti Rimbawan pada tahun 2021, BP2SDM melakukan evaluasi terhadap program tersebut, yang hasilnya disampaikan dalam lokakarya pada 14 Oktober 2021 secara daring dan luring di Jakarta. Lokakarya yang didukung oleh FORCLIME ini dibuka oleh Dr. Ir. Iwan Setiawan, M.Sc., Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari hasil kajian dan evaluasi, ada beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program Bakti Rimbawan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM baik yang ada di pusat maupun daerah.
2. Ketidakjelasan masa depan menjadi demotivasi bagi tenaga BR yang bertugas di lapangan.
3. Kewenangan KPH semakin terbatas sebagai lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa hanya ada 7 dari 25 provinsi yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembiayaan tenaga Bakti Rimbawan. Ketujuh propinsi itu adalah: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara – dari hasil kajian telah teridentifikasi Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat, namun proses konsultasi di daerah belum selesai. Dengan demikian, hanya 20-30% yang siap melanjutkan Program Bakti.

Salah satu keluaran dari hasil evaluasi terhadap Program Bakti Rimbawan adalah skenario *exit strategy*, yaitu:

1. Skenario jangka pendek (bersifat afirmatif), melimpahkan 32% BR ke Pemda untuk menjadi tenaga honorer KPH dan 68% sisanya direalokasikan ke unit kerja KLHK sebagai tenaga honorer.
2. Skenario jangka menengah (bersifat kompetitif), mempersiapkan tenaga Bakti Rimbawan menjadi pegawai tetap (ASN) KPH, melalui mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
3. Skenario jangka panjang (bersifat fasilitatif), menyusun rencana aksi daerah dalam hal pemenuhan target rasio standar SDM kehutanan di KPH (minimal 25 orang per KPH).

Berdasarkan hasil kajian, untuk menopang masing-masing skenario, BP2SDM perlu melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan kementerian/lembaga terkait di pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas serta Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, koordinasi juga perlu dilakukan dengan pemerintah daerah, seperti dinas kehutanan dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD), guna merumuskan strategi kebijakan pemenuhan dan pengembangan SDM KPH ke depan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi beserta BKD perlu aktif mengusulkan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pemenuhan kebutuhan SDM di KPH baik melalui formasi ASN maupun melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

**Wira Hakim**, Advisor junior pengembangan kapasitas SDM  
**Edy Marbyanto**, Manajer bidang strategis pengembangan kapasitas SDM

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Alamat FORCLIME: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blok 7 lantai 6. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270  
T: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214  
[www.forclime.org](http://www.forclime.org)  
Surel korespondensi: [ratu.widyawati@giz.de](mailto:ratu.widyawati@giz.de)